

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada dasarnya Rusia dan Ukraina mengalami perjalanan sejarah yang hampir sama, salah satunya kedua negara tersebut merupakan negara pecahan dari Uni Soviet. Uni Soviet mulai runtuh pada tahun 1991, kondisi tersebut menyebabkan 15 negara di eropa timur mendapatkan kemerdekaannya masing-masing, seperti; Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajkistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Dari ke-15 negara pecahan Uni Soviet, Rusia merupakan pusat kekuatan komunis dan wilayah Ukraina merupakan salah satu pusat pangkalan pertahanan yang kuat yang dimiliki Uni Soviet waktu itu. Namun ikatan sejarah diatas tidak dapat dijadikan jaminan bagi kedua negara untuk hidup damai dan tidak berkonflik pada kemudian hari, terlebih saat ini dibawah kepemimpinan Vladimir Putin sangat tampak di mata dunia internasional bahwa terdapat keinginan Rusia untuk mengembalikan masa kejayaan Uni Soviet dan menciptakan Rusia Raya.

Rusia merupakan salah satu negara terluas di dunia, dengan luas wilayah 17.075.400 km² membentang mulai dari sebelah timur Eropa hingga utara Asia. Negara ini menjadi pewaris utama Uni Soviet paska keruntuhannya, mendapatkan 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih terdapat 50% aset-aset ekonomi dan militer. Melihat kondisi diatas ditambah

dengan gaya otoritarian kepemimpinan dari presiden Vladimir Putin, Rusia mencoba bangkit dan menandingi kekuatan Amerika Serikat yang saat ini seolah tampil sebagai penguasa tunggal dunia. Namun terkadang tindakan Rusia yang berlebihan dalam memanfaatkan kekuatan militernya berdampak negatif pada citra negaranya terhadap dunia internasional, seperti dalam kasus Georgia pada tahun 2008

Ukraina merupakan salah satu dari 15 negara bagian Uni Soviet yang memperoleh kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991 setelah keruntuhan Uni Soviet. Disisi lain Ukraina adalah pewaris sumber daya alam dan wilayah strategis militer Uni Soviet. Meskipun kemerdekaan telah dicapai oleh masyarakat Ukraina, namun prinsip dan nilai demokrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan di negara tersebut. Kesejahteraan masyarakat sulit tercapai dikarenakan banyak pejabat pemerintahan yang masih melakukan korupsi dan menerapkan privatisasi.

Pada tahun 1997 Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan traktat persahabatan, kerja sama dan juga kemitran. Dalam kesepakatan tersebut, Rusia mengakui status Sevastopol sebagai bagian dari wilayah Ukraina, meskipun pada dasarnya Sevastopol merupakan kunci strategis keamanan dan pertahanan Rusia di wilayah timur. Sementara itu Ukraina memberi hak bagi Rusia untuk mempertahankan Pangkalan Angkatan Lautnya di perairan Sevastopol.

Peta politik Rusia dan Ukraina mengalami perubahan pada bulan November 2013, yang mana Presiden Yanukovich secara sepihak

membatalkan rencana integrasi politik dan ekonomi Ukraina kepada Uni Eropa. Kondisi disamping menjadi cikal bakal lahirnya krisis Ukraina. Krisis ini diawali dengan munculnya gerakan demonstrasi di sejumlah kota di Ukraina yang mana menentang keras kebijakan Presiden Yanukovich. Adanya gelombang yang kontra terhadap sikap sepihak yang dilakukan Presiden Yanukovich melahirkan masyarakat Ukraina terpecah menjadi dua dan berdampak pada peningkatan krisis yang menyebar ke seluruh kota di Ukraina.

Pada akhir tahun 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan 16.000 personil militernya ke Semenanjung Crimea. Kemudian diikuti dengan sejumlah pengiriman pasukan militer pada bulan-bulan selanjutnya. Disini unit pasukan militer Rusia mulai mengambil alih sejumlah bangunan infrastruktur, seperti bangunan pemerintahan, perusahaan komunikasi, menduduki tempat-tempat umum, dan lain-lain. Selain itu mereka juga memblokir pasukan militer Ukraina.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti peran militer Rusia dalam mengintervensi Ukraina, munculnya gerakan separatisme dan dampak konflik tersebut terhadap hubungan Rusia dengan Uni Eropa.

Disamping itu tujuan lain dari penulisan skripsi ini yakni guna mengembangkan kemampuan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori dalam ilmu hubungan internasional dalam memahami kasus negara-negara

internasional. Tujuan penelitian ini juga diarahkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata-1, yakni memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Rusia dan Ukraina merupakan negara-negara pecahan dari negara besar komunis Uni Soviet yang telah runtuh pada tahun 1991. Uni Soviet terbentuk akibat dari adanya perang saudara yang terjadi di wilayah bekas Imperium Rusia dan mendapatkan dukungan dari Tentara Merah. Pada awal mulanya Uni Soviet hanya terdiri dari 6 negara yang berdaulat secara formal dan mendapatkan kemerdekaannya secara bersamaan dimasa Perang Saudara. Keenam negara tersebut yakni; Rusia, Ukraina, Belorussia, Azerbaijan, Armenia, dan Georgia.

Uni Soviet resmi mendeklarasikan diri menjadi suatu negara yang berdaulat pada tanggal 30 Desember 1922, dengan luas negara yang mencapai 22.402.200 km² dan populasi penduduk yang berjumlah 293.047.571 jiwa.¹ Paham komunisme menjadi landasan bagi negara ini untuk membentuk masyarakat yang sosialis.

Uni Soviet mengalami perubahan secara bertahap ketika terjadi masa transisi kepemimpinan dari Stanlin yang banyak dikenal sebagai diktator keras dan kejam beralih kepada Nikita Krushchev. Nikita Krushchev yang notabeneanya berasal dari etnis Ukraina melakukan banyak bentuk perubahan

¹ Dikutip dari situs http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet. Diakses pada tanggal 24 Juni 2014, pukul: 18.16 WIB.

mulai dari sistem politik, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan yang dilakukannya lebih banyak mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Langkah-langkah penting dalam upaya demokratisasi kehidupan sosial politik antara lain, adalah: Penghentian penyelidikan “Kasus Dokter”, pembebasan tahanan politik yang terlibat dalam “Kasus Mingrels”, dan juga menghapus sistem komando administrasi-birokrasi yang populer ketika masa Stanlin.²

Republik Sosialis Soviet Otonom Crimea didirikan pada tahun 1921 setelah terjadinya perang saudara pada tahun 1917-1920. Republik Crimea sempat menjadi bagian dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia. Namun pada Perang Dunia ke-II wilayah Crimea diduduki oleh pasukan Jerman dan Rumania selama empat tahun, sebelum dibebaskan oleh pasukan Soviet. Nikita Khrushchev dianggap sebagai sosok malaikat dalam menetapkan kebijakan pada kasus otoritas semenanjung Crimea Pada tanggal 19 Februari 1954 Presidium Dewan Agung Uni Soviet yakni Khrushchev menetapkan kebijakan bahwa kawasan Crimea diberikan dari Republik Sosialis Federal Soviet Rusia ke Republik Sosialis Soviet Ukraina. Hal tersebut merupakan hadiah sekaligus bentuk apresiasi dari Uni Soviet yang menganggap Republik Sosialis Soviet Ukraina telah setia menjadi bagian dari kekaisaran Rusia dalam kurun waktu 300 tahun. Keberadaan Crimea dibawah Ukraina diterima oleh semua pihak baik Rusia maupun Ukraina dan berjalan aman hingga runtuhnya Uni Soviet dan Ukraina memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1991.

²Fahrurrodji, A. 2005. *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: YOI. Hal.151.

Satu tahun paska kemerdekaan yang diperoleh Ukraina yakni tahun 1992 para politisi pro-Rusia yang beraktivitas di Crimea mengadakan kampanye pada pemerintahan Ukraina. Mereka menginginkan adanya bentuk referendum agar Crimea dapat melepaskan diri dari otoritas Ukraina dan kembali pada Rusia. Namun disisi lain Parlemen Rusia tidak menerima keinginan dari Parlemen Crimea tersebut dan membatalkan pengambilalihan Crimea dari Ukraina. Melalui memorandum Budapest pada tahun 1994, Rusia secara hukum tertulis mengakui status hukum Crimea sebagai bagian dari wilayah Ukraina. Perjanjian diatas juga ditandatangani oleh Amerika Serikat, Perancis dan juga Inggris.

Krisis Ukraina dimulai pada bulan November 2013. Hal tersebut dipicu oleh tindakan presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang secara tiba-tiba membatalkan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa ditengah krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara Eropa. Disisi lain Viktor Yanukovych lebih memilih untuk menerima pinjaman hutang yang diberikan oleh Rusia sebesar 15 miliar dollar AS.

Kebijakan sepihak Yanukovych yang lebih memilih untuk merapat ke Rusia dibanding Uni Eropa berdampak terpecah belahnya masyarakat Ukraina menjadi dua kubu. Muncul gelombang demonstrasi yang menentang akan kebijakan Yanukovych untuk membatalkan penandatanganan dengan Uni Eropa. Aksi demonstrasi berdampak pada peningkatan krisis yang menyebar ke seluruh kota di Ukraina.

Pada akhir tahun 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan 16.000 personil militernya ke Semenanjung Crimea. Kemudian diikuti dengan sejumlah pengiriman pasukan militer pada bulan-bulan selanjutnya. Disini unit pasukan militer Rusia mulai mengambil alih sejumlah bangunan infrastruktur, seperti bangunan pemerintahan, perusahaan komunikasi, menduduki tempat-tempat umum, dan lain-lain. Selain itu mereka juga memblokir pasukan militer Ukraina.

D. Pokok Pemasalahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Mengapa Rusia melakukan intervensi militer terhadap Ukraina di Semenanjung Crimea?”**.

E. Kerangka Konseptual.

Untuk membantu penulis dalam menjawab pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan dua kerangka teoritis, yakni: teori intervensi militer dan teori pilihan rasional.

Setiap negara mempunyai metode dan strategi yang beragam dalam rangka mencapai kepentingan nasional dan menerapkan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan perspektif kaum realisme, kekuatan negara berfokus pada pengembangan militer, karena kekuatan militer merupakan jalur alternatif untuk memperluas kekuasaan. Mayoritas negara-negara besar menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya, termasuk mengambil langkah intervensi militer.

Adapun Intervensi menurut Bikhu Parekh yakni upaya mencampuri urusan negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan fisik yang diakibatkan oleh disintegrasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari suatu negara dan membantu menciptakan struktur pemerintah sipil agar terus berjalan. Oleh karenanya alasan pencegahan dari adanya penderitaan fisik atau kemunculan korban yang meluas yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan bentuk intervensi menjadi sebab yang dibenarkan untuk dilakukan.³ Menurut Adam Roberts, suatu negara mengintervensi secara militer tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dapat bertujuan untuk mencegah penderitaan atau kematian yang meluas di antara penduduk.⁴

Dari pengertian diatas aksi militer yang dimaksud yakni intervensi humaniter dengan situasi ketika sejumlah tindakan telah diambil untuk mencegah penderitaan yang diakibatkan oleh pemerintah represif atau konflik internal yang berkembang yang mana hak-hak politik dan sipil dari warga negara telah dilanggar. Intervensi militer didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan dengan melintasi perbatasan negara oleh kelompok negara dan organisasi regional dengan pembenaran alasan guna memulihkan perdamaian dan keamanan sebagaimana mengakhiri penderitaan dan pelanggaran HAM yang meluas melalui bantuan multilateral tanpa persetujuan dari negara yang

³ C. Chang. 2011. *Ethical Foreign Policy?: US Humanitarian Interventions*, Burlington. US: Ashgate Publishing. Hal. 11.

⁴ Reed and D. Ryall. 2007. *The Price of Peace: Just war in the twenty-first century*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Hal. 110.

mana intervensi tersebut terjadi.⁵ Disini, terdapat keunggulan dalam menggunakan intervensi militer bagi suatu negara yakni diantaranya adalah untuk melindungi warga tidak berdosa maupun membantu untuk menjatuhkan rezim.⁶

Menurut Martin Ortega terdapat 10 pola intervensi militer berdasarkan contoh sejarahnya⁷ yakni:

1. Pola imperialistik: negara kuat mengintervensi secara militer di negara lain untuk memperoleh keuntungan, memperdalam kepentingannya, dan meningkatkan pengaruh terhadap negara target dan dunia internasional. Pola ini juga biasa disebut dengan intervensi hegemoni yang mana terjadi ketika negara hegemoni mengintervensi negara lain agar tidak lepas dari pengaruhnya guna menjauhkan perkembangan politik tidak disukai oleh kepentingannya.
2. Pola kolonial: kepentingan nasional dari negara kolonialis kuat dipaksakan dengan keras terhadap negara lemah, perang candu terhadap China dan diplomasi gunboat terhadap Amerika Latin pada abad ke-19 adalah contoh dari pola ini.

⁵ Anthony T. Eniayejuni. The Role of The West and Military Intervention in Libya. Diakses dalam situs: <http://www.foreignpolicyjournal.com/2012/04/07/the-role-of-the-west-and-military-intervention-in-libya/> Pada tanggal 28 April 2015, pukul: 17.03 WIB.

⁶ Hekingil, F. (2013, Mei 21). *Advantages/Disadvantages Essay: Military Intervention*. Retrieved April 22, 2015, from The Prop Room: <http://theproproom.blogspot.com/2013/05/advantages-disadvantages-essay-military.html>

⁷ Ortega, M. 2001. *Military Intervention and European Union*. Paris: Institute for Security Studies Western European Union. Hal 5.

3. Perimbangan kekuatan. Selama berabad-abad ciri utama yang menagatur hubungan antar negara Eropa adalah perimbangan kekuatan antar negara berdaulat yang mengakibatkan terjadinya non-intervensi. Akan tetapi perang dan intervensi terkadang digunakan sebagai alat untuk memperbaiki keseimbangan dan mencegah transformasi dari sistem multipolar menjadi hegemoni yang didominasi oleh satu aktor. Dalam perang suksesi Spanyol, pada awal abad ke-18, justifikasi yang digunakan untuk intervensi asing adalah klaim dan pewaris tahta yang sah akan tetapi tujuan sebenarnya yakni mencegah Bourbon Perancis menjadi terlalu kuat.
4. Ideologi. Negara yang mengintervensi mencoba untuk mengubah sistem politik dari negara sasaran dengan alasan ideologi. Sebagai contoh, dari tahun 1815 sampai 1830 aliansi suci mengintervensi untuk mendukung rezim monarki ketika berhadapan dengan revolusi demokratik di Eropa. Sementara intervensi AS di tahun 1980-an dirancang untuk menegakkan demokrasi.
5. Penentuan nasib sendiri, intervensi dalam perang saudara bisa jadi mempunyai motif imperialistik atau ideologi, tapi niat yang ada terkadang untuk mendukung salah satu pihak yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri. Persamaannya, intervensi asing juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang melawan pendudukan kolonial.

6. Membela diri. Angkatan bersenjata digunakan negara untuk membalas serangan dari pihak-pihak yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahnya. Tujuan dari intervensi ini tidak untuk menggulingkan pemerintah dari negara sasaran, tapi untuk mencegah serangan. Israel pada tahun 1980-an dan Turki di utara Irak sering mengintervensi berdasarkan pola ini.
7. Pola intervensi era perang dingin. Antara 1945 dan 1990 dua negara adidaya mengintervensi di wilayah yang dipersengketakan baik dalam pola imperialistik atau ideologi. Pola ini meluas pada masa dekolonisasi dalam sistem lingkungan bipolar yang tidak biasa sehingga pola baru intervensi dapat ditetapkan. Contohnya yakni intervensi Uni Soviet di Hongaria pada tahun 1956 dan Afghanistan tahun 1979, atau intervensi Amerika Serikat dalam perang saudara Vietnam dari tahun 1964.
8. Intervensi Humaniter. Satu atau dua kelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk meredakan penderitaan manusia dalam wilayah negara lain. Terdapat dua situasi yang dibedakan antara lain; perlindungan warga negara di luar negeri, seperti intervensi Israel tahun 1976 di Enetebbe Uganda, atau perlindungan penduduk negara lain atau minoritas dalam contoh bencana kemanusiaan yang diprovokasi oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada tahun 1991 dalam Operasi provide comfort di Irak utara.

9. Intervensi Kolektif. Komunitas internasional secara keseluruhan memutuskan untuk mengintervensi secara militer dalam suatu negara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat dua perbedaan antara pola ini dan pola sebelumnya yakni pihak yang mengotorisasi intervensi ini adalah Dewan Keamanan PBB yang mewakili komunitas internasional tanpa berlandaskan fakta bahwa intervensi tersebut dilakukan oleh satu atau beberapa negara atau organisasi internasional yang bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tipe intervensi ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat suatu negara yang telah diorganisasikan dengan wewenang umum. Intervensi dengan kekuatan yang disahkan oleh DK PBB sepanjang tahun 1990-an terjadi di Irak, Somalia, Bosnia, Haiti, dan Timor Timur.

10. Intervensi untuk penghukuman. Beberapa negara melakukan serangan pada negara lain untuk menghukum kesalahan yang dilakukan terhadap negara lain. Serangan AS pada Libya tahun 1996, serangan rudal AS terhadap target di Sudan dan Afghanistan pada 1998 masuk dalam kategori ini.

Intervensi militer umumnya banyak dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan besar dalam rangka memenuhi kepentingan nasional ataupun kepentingan luar negerinya. Krisis yang berkembang pada Semenanjung Crimea, Ukraina tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan Rusia

didalamnya. Satu bentuk campur tangan Rusia yakni dengan menetapkan kebijakan intervensi militer dalam menanggapi krisis yang berkembang. Putin telah mengirimkan sejumlah unit militernya pada Semenanjung Crimea, langkah ini mempunyai keterkaitan dengan kepentingan nasional maupun kepentingan luar negeri yang ingin dicapainya.

Pada dasarnya politik luar negeri merupakan rumusan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan untuk berinteraksi dengan negara lain dan lingkungan internasionalnya. Disamping itu juga merupakan cita-cita ataupun tujuan negara. Menurut Viotti Kauppi, model teori rasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri menjadi dasar bagi alternatif, kebijakan, dan tindakan para pembuat kebijakan agar tujuan akhir dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pada dasarnya model ini tidak sangat bergantung pada pembuat kebijakan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai dan cara yang dianggap paling efektif dalam mencapainya.⁸

Teori pilihan rasional memfokuskan perhatiannya pada aktor-aktor dari para pembuat kebijakan dan pilihan-pilihan yang mereka buat. Pada umumnya mereka akan merumuskan kebijakannya dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkannya dari keadaan disekitarnya. Namun tidak sedikit bagi mereka yang lebih mencari keuntungan terhadap kepentingan

⁸ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. 1993. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, 2nd ed., New York: MacMillan Publishing Company. Hal. 583.

mereka masing-masing. Dalam hal ini para pembuat kebijakan akan memaksimalkan kepuasan mereka dalam pengambilan keputusan.⁹

Teori ini juga didasarkan pada ide bahwa semua tindakan adalah rasional secara fundamental dan bahwa orang telah memperhitungkan untung rugi dari setiap tindakan sebelum mereka memutuskan untuk melakukannya.¹⁰ Pada dasarnya teori pilihan rasional melihat bahwa dalam memahami tindakan atau fenomena internasional tergantung pada individu yang terlibat di dalamnya atau pengambilan keputusan, tujuan, konteks, serta hubungannya dengan pembuat keputusan.

Rusia dipandang mempunyai kekuatan yang besar dan dominan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal tersebut didasarkan pada letak geografis yang luas dan strategis, sumber daya alam dan manusia yang melimpah, hingga kesiagaan militer yang kuat. Tidak salah kemudian di era ini Rusia mempunyai ambisi untuk menandingi eksistensi Amerika Serikat yang tampil sebagai negara super power. Politik luar negeri Rusia dibawah Presiden Vladimir Putin banyak memfokuskan pada hal keamanan strategis di negara-negara pecahan Uni Soviet, sekaligus mempertahankan eksistensi Rusia didalamnya.

⁹ Elizabeth Nunn, "The Rational Choice Approach to IPE", dalam David N. Ballam dan Michael Veseth. 1996. *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Hal. 77.

¹⁰ John Scott, *Rational Choice Theory*, dalam G. Browning, A. Halcli, N. Hewlett, and F. Webster. 2000. *Understanding Contemporary Society. Theories of the present: sage publications*.

Dalam menanggapi krisis yang berkembang di Semenanjung Crimea, Ukraina yang terjadi pada akhir tahun 2013, Putin dengan cepat memberikan respon tegas. Tidak heran ketika kebijakan intervensi militer sudah ia terapkan diawal krisis. Putin meyakini bahwa kebijakan tersebut adalah rasional secara fundamental dan langkah efektif yang mana akan menghasilkan banyak keuntungan dibandingkan dengan kerugiannya.

F. Hipotesa

Rusia melakukan intervensi militer terhadap Ukraina khususnya di wilayah Semenanjung Crimea karena intervensi militer dianggap lebih efektif untuk:

1. Mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina yang mulai beralih ke barat setelah penggulingan terhadap mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich.
2. Melindungi etnis Rusia di kawasan Ukraina, terlebih di Semenanjung Crimea.
3. Mengamankan keberadaan Armada Laut Hitam di daerah Sevastopol yang merupakan pangkalan strategis Rusia di kawasan Timur.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jangkauan penulis akan dibatasi oleh ruang lingkup dan batasan waktu. Hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan

pembahasan tentang pokok permasalahan yang diangkat. Dalam hal batasan ruang lingkup, penulis lebih memfokuskan pada wilayah Rusia dan Ukraina, tanpa mengesampingkan wilayah disekitarnya yang mempunyai hubungan diantara dua negara tersebut. Disamping itu dalam hal batasan waktu, penulis mengambil kurun waktu antara tahun 2013-2014. Pada tahun 2013 merupakan awal dari kemunculan konflik antara Rusia dan Ukraina yang berawal dari instabilitas politik domestik Ukraina, kemudian dilanjutkan pada tahun 2014 yang mana konflik tersebut memasuki babak baru dengan adanya bentuk intervensi militer dan lahirnya gerakan separatis. Namun, tidak menutup kemungkinan, apabila penulis akan menjelaskan dan memaparkan masalah di luar batasan tersebut.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, media massa, data-data dari website, serta dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada. Teknis analisi data yang digunakan yaitu teknik deksriptif. Disamping itu dalam skripsi ini juga menggunakan metode deduksi, yakni penggunaan teori sebagai landasan analisa untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya terdapat unsur-unsur metodologis karya ilmiah yang meliputi; Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Konseptual, Hipotesa, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: Sejarah Hubungan antara Rusia dan Ukraina

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan sejarah dan pasang surut hubungan antara Rusia dan Ukraina yang mana kedua negara tersebut merupakan negara pecahan Uni Soviet, hingga sebelum lahirnya konflik di Semenanjung Crimea, Ukraina. Disamping itu bab ini juga akan menjelaskan tentang politik pemerintahan Rusia dan Ukraina.

Bab III: Intervensi Militer Rusia terhadap Krisis Ukraina

Pada bab tiga akan dijelaskan latar belakang dan dinamika krisis yang terjadi di Ukraina, termasuk lahirnya gejolak demonstrasi di kota-kota Ukraina. Disamping itu juga dijelaskan tentang bentuk-bentuk intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Pada bab ini juga menjelaskan munculnya dampak perekonomian bagi Ukraina.

Bab IV: Sebab-sebab Intervensi Militer Rusia Terhadap Krisis di Semenanjung Crimea, Ukraina

Pada bab empat penulis akan menjelaskan tentang sebab Rusia mengambil cara intervensi militer terhadap krisis yang terjadi di Semenanjung

Crimea, Ukraina. Kemudian juga menjelaskan tujuan utama dari digunakannya cara intervensi militer di Semenanjung Crimea.

Bab V : Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari seluruh bab dalam penulisan ini.